



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124 /V.4/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - k. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - l. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari:
- a) Ketua;
 - b) Sekretaris; dan
 - c) Anggota.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan tugas dan fungsi di UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan wajib mengoptimalkan waktu diluar jam/hari kerja.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124 /V.4/HK/2017
TANGGAL : 13 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA/NIP	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Eka Putranta. ST 19590826 199703 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
2.	M. Abdillah Sjaheru. ST 19800527 200212 1 004	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
3.	Mardianto 19780301 200701 1 007	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
4.	Agung Trimansyah, ST. MT 19850914 200902 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
5.	Sony Agustama 19800820 200903 1 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
6.	Husin MR, ST. MM 19610919 198503 1 003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
7.	Agus Setiadi, ST 19760802 200701 1 021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
8.	Ade Kurnia, ST. MT 19760504 200801 1 017	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
9.	Sepriyanto, ST. MT 19730924 200604 1 003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
10.	Hardinal Amarson, ST.MSc 19760502 200212 1 013	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	
11.	Ir. Andi Widjonarko Tribaskoro 19680126 199403 1 008	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
12.	Hermalia, SP.MM. 19750109 200003 2 004	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
13.	Abdy Winardy, SE 19840208 201001 1 006	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
14.	Rully Mahawijaya, S.Sos 19720221 199103 1 007	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	
15.	Nuning Sri Rahayu, SE. 19721203 199603 2 001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	

16.	Endi Fauzi, ST. MT. 19750807 200003 1 002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
17.	Drs. Irhana Yusuf, MM 19671020 198701 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
18.	Aldila L. Saputra A.F. SH. MH. 19850727 200804 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
19.	Basuki, S.Sos. 19601012 198102 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	
20.	Untung Widodo, A.Md LLAJ 19620510 198703 1 010	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
21.	Meriesa Jovanita Putri, S.S.iT 19840724 200801 2 001	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
22.	Ivan Yulindo, SE 19770719 201101 1 001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	
23.	Niniek Ambarwati, S.Si, Apt. 19740529 200012 2 004	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
24.	Yulianto, SKM, M.Kes 19690722 199303 1 004	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
25.	Sutarji, S.Si. M. Kes. 19701026 199703 1 002	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
26.	Andi Yudiansyah Hr. 19770306 199803 1 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
27.	Iskandar, S.Sos 19670318 199003 1 012	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
28.	Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi. 19781128 200604 1 007	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
29.	Siswadi 19670830 199903 1 004	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
30.	Yohanes Sulistiono, SE.MM 19790203 200502 1 002	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung	
31.	Boni Yudhiyanto, SP 19770209 199603 1 001	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	
32.	Bayuma Askari, SP 19750421 199603 1 002	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	
33.	Agus Dwi Sunarti, SE, MM 19620812 198610 2 009	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	
34.	Hazalbi, S.Pi 19670520 199103 1 006	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	
35.	Ani Siswati, S.Si,Apt 19771111 200501 2 012	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	
36.	Drh. Anwar Fuadi, MPH 19760523 200501 1 002	Dinas Perkebunan dan Pternakan Provinsi Lampung	
37.	Bunawar Holil Roni, SP 19740121 199803 1 005	Dinas Perkebunan dan Pternakan Provinsi Lampung	

38.	Mas Sugiri, S.Pt 19690429 200701 1 005	Dinas Perkebunan dan Pternakan Provinsi Lampung	
39.	Andri Yoansyah, SP 19800120 201101 1 004	Dinas Perkebunan dan Pternakan Provinsi Lampung	
40.	Andrianto, S.Sos 19720611 199703 1 005	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	
41.	Belly Pahluphi, ST, MT 19751223 200003 1 004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	
42.	Wan M. Nasir Waya, SP.MM 19700921 200212 1 002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	
43.	Atria Dewi, SE 19840325 200212 2 003	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung	
44.	Irsan Insan Agung, SP 19750916 201001 1 002	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	
45.	Herman Dani, A.md 19840925 201001 1 012	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	
46.	M. Asri, S.Sos 19711229 200801 1 007	Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	
47.	Budi Setiawan, S.Kom 19720531 200212 1 006	Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	
48.	Bahrin Cholil, SH, MH 19601007 198203 1 008	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	
49.	Hamid, SKM 19660309 199101 1 004	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	
50.	Subarokah, S.ST 19760221 200501 1 004	RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	
51.	Heri Wisnu Haryatno, ST 19800228 200604 1 004	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
52.	A. Rachman Yusuf, ST 19790520 200812 1 001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
53.	Suranto 19600620 198503 1 015	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
54.	Anto Supriyanto 19730703 200212 1 001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
55.	Teguh Dwianto 19680628 199803 1 005	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
56.	Adenan Yusuf, ST 19840306 200903 1 002	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	

57.	Rusdianto 19710625 199703 1 004	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
58.	Zaldi Ronald, ST 19791018 200804 1 001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
59.	Dharma Gunawan, S.Sos. MM 19800718 200003 1 003	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
60.	Harjanto Setiaji, A.Md 19740821 200212 1 003	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO